Disinformasi Digital dan Kepercayaan Publik dalam Demokrasi Lokal: Peran Literasi Politik di Kota Tegal

A'zham Albar Rasyid[1]
[1]Politeknik Damara Tegal
Korespondensi Email : azamalbar6@gmail.com

Abstract

Digital platforms have expanded access to political information while simultaneously increasing exposure to misinformation, disinformation, manipulative framing, and hate-based content. This study analyzes how digital disinformation, political literacy, and public trust interact within local democracy in Tegal Municipality, Central Java. A document-based qualitative design was employed through thematic analysis and triangulation of official election documents, statistical publications, digital-literacy reports, fact-checking records, and peer-reviewed studies. Evidence from the Tegal Election Commission and Election Supervisory Body was interpreted alongside national data from Statistics Indonesia, APJII, the Ministry of Communication and Digital Affairs, and Mafindo. The findings indicate that democratic risk emerges from the interaction of platform amplification, unequal verification capacity, political polarization, and institutional credibility rather than from false information alone. Political literacy functions as a protective civic capacity by strengthening source evaluation, contextual reasoning, verification practices, and evidence-based institutional judgment. The study contributes a multi-actor local digital-democracy resilience framework integrating transparent public communication, electoral supervision, local fact-checking, continuous civic education, media verification capacity, and participatory digital literacy.

Keywords: *Digital Disinformation; Political Literacy; Political Trust; Local Democracy; Digital Resilience; Tegal Municipality*

Abstrak

Platform digital memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik sekaligus meningkatkan paparan terhadap misinformasi, disinformasi, framing manipulatif, dan konten berbasis kebencian. Penelitian ini menganalisis keterkaitan disinformasi digital, literasi politik, dan kepercayaan publik dalam demokrasi lokal di Kota Tegal. Penelitian menggunakan desain kualitatif berbasis dokumen melalui analisis tematik dan triangulasi terhadap dokumen kepemiluan resmi, publikasi statistik, laporan literasi digital, catatan pemeriksaan fakta, dan artikel ilmiah. Bukti lokal dari KPU dan Bawaslu Kota Tegal dibaca bersama data nasional dari BPS, APJII, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Mafindo. Hasil menunjukkan bahwa risiko demokrasi tidak hanya bersumber dari informasi palsu, tetapi dari interaksi amplifikasi platform, ketimpangan kapasitas verifikasi, polarisasi politik, dan kredibilitas institusi. Literasi politik berfungsi sebagai kapasitas protektif warga melalui evaluasi sumber, penalaran kontekstual, praktik verifikasi, dan penilaian institusional berbasis bukti. Kontribusi penelitian berupa kerangka ketahanan demokrasi digital lokal multiaktor yang mengintegrasikan komunikasi publik transparan, pengawasan pemilu, pemeriksaan fakta lokal, pendidikan kewargaan berkelanjutan, penguatan media, dan literasi digital partisipatif.

Kata kunci: Disinformasi Digital; Literasi Politik; Kepercayaan Politik; Demokrasi Lokal; Ketahanan Digital; Kota Tegal

Pendahuluan

Transformasi teknologi digital telah mengubah cara warga memperoleh, menyaring, menafsirkan, dan mendistribusikan informasi politik. Dalam sistem media hibrida, arus informasi tidak lagi sepenuhnya dimediasi organisasi pers, melainkan bergerak melalui interaksi antara media profesional, aktor politik, influencer, kelompok kepentingan, algoritma platform, dan pengguna biasa. Perubahan ini memperluas ruang partisipasi dan mempercepat komunikasi pemerintah dengan warga, tetapi struktur yang sama juga meningkatkan peluang beredarnya klaim tidak terverifikasi, potongan informasi tanpa konteks, konten manipulatif, ujaran kebencian, serta propaganda terkoordinasi. Karena itu, demokratisasi akses informasi tidak otomatis menghasilkan demokratisasi kualitas pengetahuan politik. Persoalan utama bukan sekadar meningkatnya volume informasi, melainkan kemampuan warga membedakan informasi faktual, opini, manipulasi, dan klaim yang sengaja menyesatkan.

Literatur information disorder membedakan misinformation sebagai informasi salah yang disebarkan tanpa maksud merugikan, disinformation sebagai informasi salah atau menyesatkan yang sengaja diproduksi untuk mencapai tujuan tertentu, dan malinformation sebagai informasi yang mungkin benar tetapi digunakan secara manipulatif (Wardle & Derakhshan, 2017). Dalam politik, ketiga bentuk gangguan informasi penting karena penilaian warga terhadap kandidat, lembaga, proses pemilu, kebijakan, dan legitimasi pemerintahan sangat bergantung pada kualitas informasi yang tersedia. Di era platform, masalah ini diperkuat oleh mekanisme rekomendasi, monetisasi perhatian, dan sirkulasi lintas-platform yang memungkinkan konten emosional atau konflik memperoleh visibilitas tinggi sebelum diverifikasi.

Konteks Indonesia menunjukkan urgensi tersebut. APJII melaporkan penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5% pada 2024 dengan sekitar 221,56 juta pengguna. Pada saat yang sama, Mafindo mencatat 2.330 hoaks sepanjang 2023, sebanyak 1.292 bertema politik dan 645 berkaitan dengan Pemilu 2024. Pada semester pertama 2024, Mafindo kembali menemukan 2.119 hoaks. Angka ini tidak berarti seluruh warga menerima atau mempercayai hoaks, tetapi menunjukkan tingginya intensitas produksi dan sirkulasi konten bermasalah dalam ekosistem informasi nasional. Ahmad (2022) menegaskan bahwa kombinasi disinformation order dan perangkap algoritmik dapat memperbesar polarisasi dan menekan norma demokrasi Indonesia, sedangkan Iannone (2022) menunjukkan bahwa kontrol informasi dan disinformasi merupakan tantangan yang lebih luas bagi demokrasi Asia Tenggara.

Dalam kondisi tersebut, literasi politik menjadi kapasitas penting. Literasi politik lebih luas daripada kemampuan menggunakan perangkat digital. Ia mencakup pengetahuan mengenai institusi, aktor, prosedur demokrasi, hak dan kewajiban warga, kemampuan memahami isu kebijakan, kemampuan membedakan klaim faktual dari opini, serta kapasitas mengevaluasi sumber dan kepentingan di balik pesan politik. Perkembangan kajian misinformation juga menunjukkan bahwa media literacy dan perhatian terhadap akurasi dapat meningkatkan kemampuan warga menilai informasi.

(Pennycook & Rand, 2021) menempatkan proses kognitif dan perhatian terhadap akurasi sebagai unsur penting dalam memahami kerentanan terhadap fake news, sedangkan Roozenbeek et al. (2022) menunjukkan bahwa psychological inoculation dapat meningkatkan ketahanan terhadap teknik manipulasi yang umum digunakan di media sosial.

Data nasional memperlihatkan kemajuan sekaligus keterbatasan. Indeks literasi digital Indonesia 2024 berada pada skor 3,78 dari lima dan masih berkategori sedang. Pilar kecakapan digital berada pada 3,81, keamanan digital 3,47, etika digital 3,81, dan budaya digital 4,05. Ketimpangan antarpilar menunjukkan bahwa kemampuan mengakses dan menggunakan teknologi tidak selalu bergerak seiring dengan kemampuan mengelola risiko, memverifikasi sumber, dan mengenali manipulasi. Dalam konteks politik, situasi ini menimbulkan paradoks: warga sangat terkoneksi, tetapi belum tentu memiliki kapasitas yang setara dalam memeriksa validitas klaim politik.

Hubungan antara disinformasi dan demokrasi perlu diletakkan pada konsep political trust. Kepercayaan politik bukan ketaatan tanpa kritik, melainkan evaluasi mengenai apakah institusi bekerja secara kompeten, adil, transparan, dan sesuai aturan. Di lingkungan digital, trust juga dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diterima warga. Humprecht (2023) menunjukkan bahwa hubungan antara trust, sikap terhadap demokrasi, dan penyebaran disinformasi bersifat kompleks dan berbeda antarkonteks. Mont'Alverne et al. (2024) juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap berita berperan penting dalam hubungan antara penggunaan media dan keyakinan pada misinformasi elektoral. Temuan tersebut menguatkan pentingnya membaca trust bukan hanya sebagai akibat kinerja institusi, tetapi sebagai hasil interaksi antara lingkungan informasi, sumber berita, dan evaluasi warga.

Kota Tegal menjadi konteks relevan untuk membaca interaksi tersebut pada tingkat lokal. BPS mencatat penduduk Kota Tegal sebanyak 288.817 jiwa pada 2025. Dalam Pemilu 2024, KPU Kota Tegal menetapkan DPT sebanyak 212.800 pemilih, sedangkan pada Pilkada 2024 ditetapkan 212.277 pemilih. Besarnya populasi pemilih dan intensitas komunikasi politik pada pemilu serentak menjadikan kualitas informasi publik sebagai bagian dari legitimasi proses elektoral. Kedekatan sosial pada tingkat kota dapat mempercepat klarifikasi informasi, tetapi juga dapat mempercepat penyebaran rumor melalui jejaring keluarga, komunitas, grup pesan instan, dan akun media sosial lokal.

Bukti lokal paling langsung berasal dari Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 Bawaslu Kota Tegal. Dokumen tersebut memasukkan materi kampanye hoaks dengan skor indikator 4,17 dan ujaran kebencian dengan skor 11,11, di samping kerawanan lain seperti sengketa hasil, netralitas aparatur, dan pemungutan suara ulang. Skor tersebut bukan jumlah kasus aktual, melainkan indikator kerawanan yang digunakan untuk membaca potensi risiko. Pada 2026, Bawaslu Kota Tegal juga memperkuat agenda literasi digital melalui Pojok Pengawasan sebagai respons terhadap pengalaman Pemilu 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa gangguan informasi telah menjadi bagian dari agenda kelembagaan demokrasi lokal, bukan lagi hanya isu nasional abstrak.

Meskipun kajian disinformasi berkembang pesat, sebagian besar penelitian berfokus pada perilaku berbagi, psikologi kognitif, polarisasi, atau arsitektur platform, sementara studi political trust lebih sering menekankan kinerja institusi dan legitimasi politik. Masih terbatas kajian yang menghubungkan lingkungan disinformasi, kapasitas literasi politik warga, dan kepercayaan terhadap institusi demokrasi dalam satu kerangka analitis pada level lokal di Indonesia. Kesenjangan ini penting karena dampak disinformasi tidak bekerja secara langsung dan seragam, melainkan dipengaruhi kemampuan warga melakukan verifikasi, sumber yang dipercaya, serta kualitas respons institusional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga dimensi yang sering dianalisis terpisah, yaitu gangguan informasi digital, kapasitas literasi politik, dan kepercayaan terhadap demokrasi lokal. Literasi politik diposisikan bukan sekadar sebagai kemampuan memahami informasi, tetapi sebagai civic epistemic competence: kapasitas warga memperoleh, mengevaluasi, membandingkan, dan menggunakan informasi politik secara bertanggung jawab. Pada saat yang sama, kepercayaan dipahami sebagai warranted trust, yaitu kepercayaan yang dibentuk oleh bukti, transparansi, responsivitas, dan kemampuan institusi mengoreksi kesalahan, bukan kepercayaan tanpa syarat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian menjawab tiga pertanyaan: bagaimana disinformasi digital membentuk lingkungan informasi politik di Kota Tegal; bagaimana literasi politik berfungsi sebagai kapasitas warga menghadapi gangguan informasi; dan bagaimana kualitas informasi serta kapasitas literasi tersebut berkaitan dengan pembentukan kepercayaan terhadap institusi demokrasi lokal. Penelitian bertujuan menganalisis hubungan konseptual dan kontekstual antara ketiga dimensi tersebut serta merumuskan strategi penguatan ketahanan demokrasi digital lokal berbasis kolaborasi multiaktor.

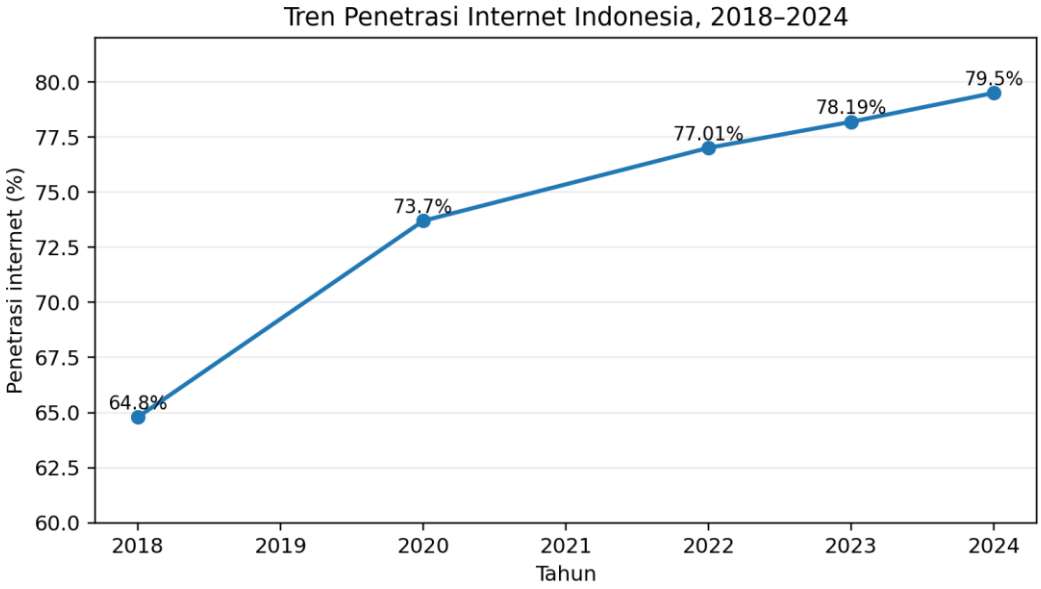

Gambar 1. Tren Penetrasi Internet Indonesia, 2018-2024.
Sumber: APJII (2024).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis dokumen (document-based qualitative study) dengan analisis konseptual, kontekstual, dan tematik. Desain ini dipilih karena tujuan penelitian bukan mengestimasi efek kausal individual melalui survei atau eksperimen, melainkan menjelaskan hubungan antara struktur informasi digital, kapasitas literasi politik, dan mekanisme kepercayaan institusional dalam demokrasi lokal Kota Tegal. Data statistik sekunder diperlakukan sebagai indikator lingkungan informasi dan konteks struktural, bukan sebagai pengganti pengukuran sikap individual warga.

Unit analisis penelitian adalah ekosistem informasi politik dan demokrasi lokal Kota Tegal. Sumber data dipilih secara purposif berdasarkan empat kriteria: otoritas sumber, relevansi dengan topik, kedekatan dengan konteks Kota Tegal atau Indonesia, dan keterbaruan. Sumber dokumenter utama meliputi publikasi BPS Kota Tegal, dokumen KPU Kota Tegal, Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 Bawaslu Kota Tegal, laporan Kementerian Komunikasi dan Digital, survei penetrasi internet APJII, serta publikasi Mafindo. Literatur akademik digunakan untuk membangun kategori analisis dan menafsirkan pola yang ditemukan.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, data numerik diekstraksi untuk memetakan konteks digital dan kepemiluan, meliputi penetrasi internet, indeks literasi digital, jumlah temuan hoaks, data pemilih, dan skor indikator kerawanan. Kedua, dilakukan thematic coding untuk mengidentifikasi enam tema: transformasi ruang informasi, pola disinformasi, kapasitas literasi dan verifikasi, kepercayaan politik, kerawanan demokrasi lokal, dan respons kelembagaan. Ketiga, temuan lokal dibandingkan dengan literatur empiris dan konseptual untuk menilai kesesuaian, perbedaan, serta implikasinya bagi tata kelola demokrasi lokal.

Proses coding bersifat deduktif-induktif. Kategori awal dibangun dari literatur mengenai information disorder, political literacy, misinformation resilience, dan political trust, kemudian disesuaikan dengan pola yang muncul dari dokumen lokal. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan sumber pemerintah, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, organisasi pemeriksa fakta, asosiasi industri internet, dan publikasi akademik. Temuan hanya dipertahankan apabila memiliki dukungan lintas-sumber atau dapat dijelaskan secara transparan sebagai konteks nasional.

Batas inferensi dijaga secara ketat. Angka nasional tidak diperlakukan sebagai pengukuran langsung kondisi warga Kota Tegal, melainkan sebagai konteks karena warga berinteraksi dalam platform dan ekosistem informasi nasional yang sama. Demikian pula, skor kerawanan Bawaslu tidak diperlakukan sebagai frekuensi kejadian aktual. Penelitian juga tidak menyimpulkan hubungan kausal antara paparan disinformasi, literasi politik, dan political trust karena tidak tersedia survei lokal yang mengukur ketiga dimensi tersebut pada responden yang sama.

Tabel 1. Sumber Data Utama dan Fungsi Analitis

Sumber	Tahun	Data utama	Fungsi analitis
BPS Kota Tegal	2026	Penduduk Kota Tegal 288.817 jiwa (2025)	Konteks demografis lokal
KPU Kota Tegal	2023-2024	DPT Pemilu 212.800; DPT Pilkada 212.277	Skala electorate dan transparansi data pemilih
Bawaslu Kota Tegal	2024-2026	Kerawanan hoaks 4,17; ujaran kebencian 11,11; program literasi	Kerentanan informasi dan respons kelembagaan
APJII	2024	Penetrasi internet 79,5%; 221,56 juta pengguna	Konteks konektivitas nasional
Komdigi	2024	Indeks literasi digital 3,78 dan empat pilar	Kapasitas digital nasional
Mafindo	2024	2.330 hoaks 2023; 1.292 politik; 2.119 hoaks semester I 2024	Intensitas disinformasi nasional

Sumber: Diolah peneliti dari BPS Kota Tegal, KPU Kota Tegal, Bawaslu Kota Tegal, APJII, Komdigi, dan Mafindo (2024-2026).

Hasil dan Diskusi

Transformasi Ruang Informasi dan Demokrasi Lokal Kota Tegal

Hasil triangulasi menunjukkan bahwa demokrasi lokal Kota Tegal berlangsung dalam lingkungan komunikasi yang semakin terdigitalisasi. Tidak tersedia angka penetrasi internet khusus Kota Tegal yang setara metodologinya dengan survei APJII

nasional, sehingga angka nasional digunakan sebagai konteks struktural. Peningkatan penetrasi internet dari 64,8% pada 2018 menjadi 79,5% pada 2024 memperlihatkan perubahan besar dalam infrastruktur komunikasi masyarakat. Kampanye, pemberitaan kandidat, pendidikan pemilih, klarifikasi penyelenggara, pengaduan pelanggaran, dan interaksi antarwarga semakin bergantung pada platform digital.

Transformasi tersebut menghasilkan dua konsekuensi yang berlangsung bersamaan. Pertama, platform menurunkan biaya akses informasi dan memperbesar keterlihatan prosedur. KPU Kota Tegal, misalnya, mendokumentasikan proses pemutakhiran data Pemilu 2024 dari DP4, DPS, DPSHP, sampai penetapan DPT. Keterlihatan proses semacam ini dapat memperkuat akuntabilitas karena warga memiliki titik rujukan faktual untuk memeriksa klaim mengenai data pemilih. Kedua, platform mengubah gatekeeping. Informasi yang mendapatkan perhatian tidak selalu informasi paling akurat, melainkan sering yang paling emosional, konfliktual, atau sesuai identitas kelompok.

Dengan demikian, kualitas demokrasi lokal tidak dapat dinilai hanya dari tingkat konektivitas atau intensitas partisipasi digital. Partisipasi yang dibangun di atas klaim salah, potongan video tanpa konteks, atau delegitimasi prosedur dapat memperbesar keterlibatan tetapi sekaligus menurunkan kualitas deliberasi. Demokrasi lokal memerlukan bukan hanya connected citizens, melainkan informed citizens yang memiliki akses pada data, memahami prosedur, dan mampu memeriksa klaim sebelum menjadikannya dasar penilaian politik.

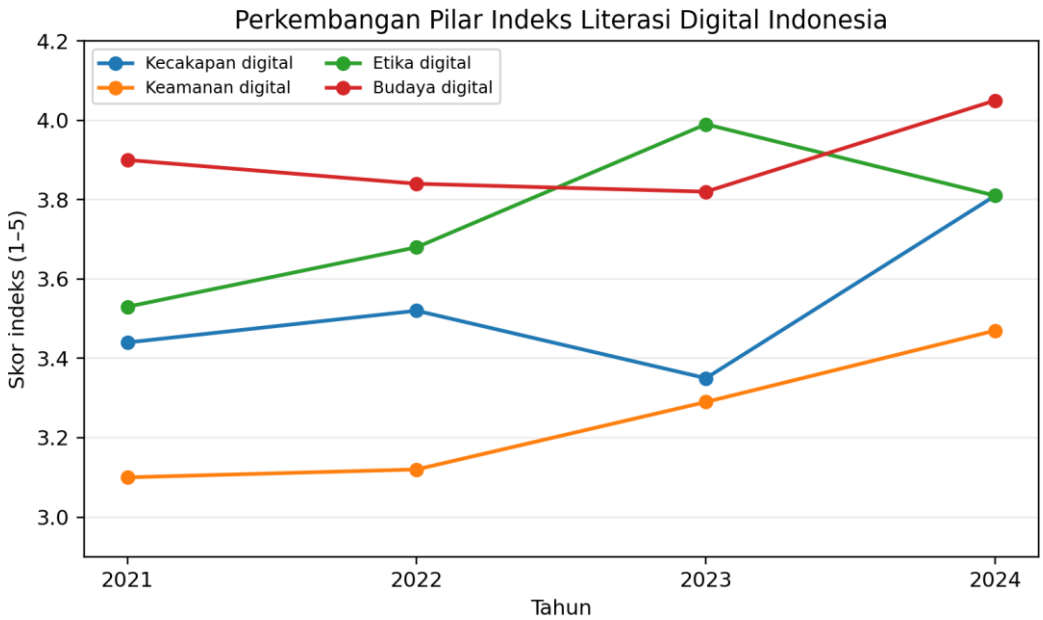

Gambar 2. Perkembangan Empat Pilar Indeks Literasi Digital Indonesia, 2021-2024.
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital (2024).

Disinformasi Digital sebagai Ancaman terhadap Kualitas Informasi Politik

Data Mafindo menunjukkan peningkatan intensitas disinformasi politik menjelang Pemilu 2024. Sepanjang 2023 ditemukan 2.330 hoaks, sebanyak 1.292 atau

55,5% bertema politik dan 645 berkaitan dengan Pemilu 2024. Pada semester pertama 2024 ditemukan 2.119 hoaks. Angka-angka ini tidak identik dengan jumlah orang yang terpapar atau mempercayai konten, tetapi merupakan indikator tingginya produksi dan sirkulasi informasi bermasalah dalam ruang digital nasional. Karena Kota Tegal berada dalam ekosistem platform yang sama, konteks tersebut relevan untuk membaca risiko lokal tanpa mengubah data nasional menjadi estimasi lokal.

Disinformasi bersifat lintas-platform. Konten video dapat dipotong menjadi klip pendek, diubah menjadi tangkapan layar, diteruskan melalui grup pesan instan, lalu memperoleh legitimasi semu karena telah beredar luas. Dinamika ini membuat strategi verifikasi berbasis satu kanal tidak memadai. Shahbazi & Bunker (2024) menunjukkan bahwa hubungan antara media sosial, informasi, dan trust memerlukan strategi respons yang berhati-hati karena intervensi digital yang buruk dapat ikut menurunkan kepercayaan. Penelitian Mont'Alverne et al. (2024) juga menegaskan pentingnya konsumsi berita dan trust terhadap sumber dalam membentuk keyakinan pada misinformasi elektoral.

Bukti lokal terdapat pada Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 Kota Tegal. Hoaks dan ujaran kebencian ditempatkan sebagai bagian dari risiko kampanye, meskipun tingkatnya berbeda dari kerawanan lain. Signifikansinya bukan pada besaran skor semata, melainkan pada pengakuan institusional bahwa integritas informasi merupakan bagian dari integritas pemilu. Hal ini menggeser fokus pengawasan dari pelanggaran formal saja menuju kualitas ekosistem informasi yang membentuk persepsi sebelum pemungutan suara.

Disinformasi juga harus dibaca sebagai persoalan struktur, bukan hanya perilaku individual. Aktor dengan sumber daya organisasi, kemampuan produksi konten, jaringan akun, atau modal iklan memiliki kapasitas lebih besar untuk memengaruhi keterlihatan pesan. Ahmad (2022) menekankan risiko perangkap algoritmik dalam demokrasi Indonesia, sedangkan Evanalia (2022) menunjukkan bahwa jurnalisme media sosial memiliki peran penting dalam menghadapi hoaks di era post-truth. Karena itu, strategi 'jangan percaya hoaks' yang hanya membebankan tanggung jawab pada individu terlalu sempit; intervensi harus menyasar kapasitas warga, institusi, media, dan tata kelola platform sekaligus.

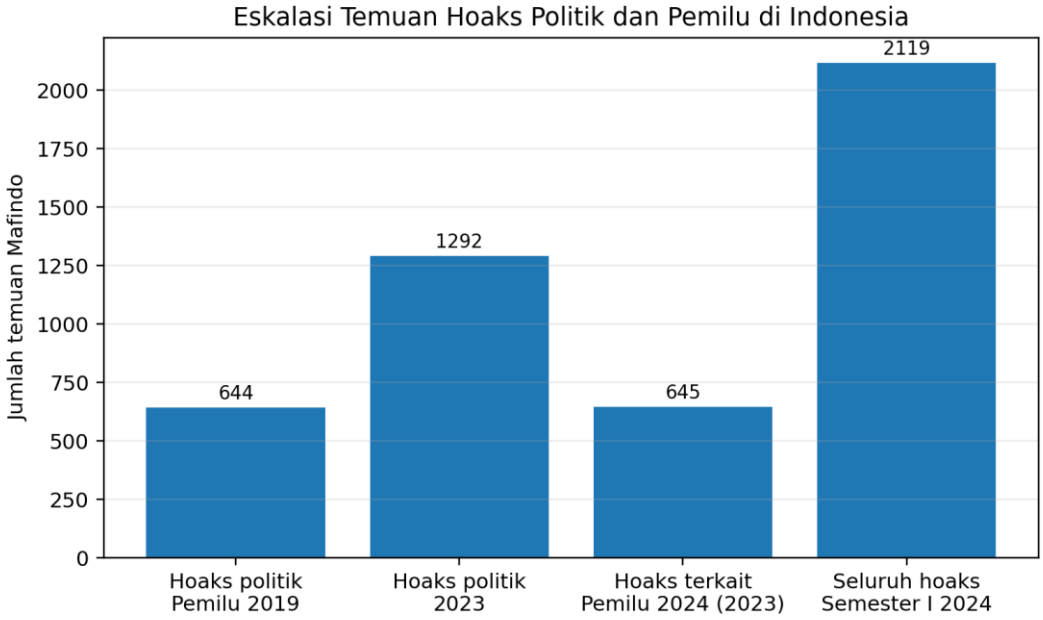

Gambar 3. Eskalasi Temuan Hoaks Politik dan Kepemiluan di Indonesia.
Sumber: Mafindo (2024a, 2024b). Catatan: kategori dan periode berbeda; grafik menunjukkan eskalasi temuan, bukan seri waktu homogen.

Literasi Politik sebagai Civic Epistemic Competence

Hasil analisis menunjukkan bahwa literasi digital perlu diperluas menjadi literasi politik. Indeks literasi digital nasional 2024 sebesar 3,78 menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas belum otomatis diikuti kapasitas keamanan dan evaluasi informasi yang setara. Dalam ranah politik, kemampuan menggunakan platform, mencari informasi, atau membuat konten perlu dilengkapi pemahaman mengenai institusi, prosedur demokrasi, sumber kewenangan, dan teknik manipulasi pesan. Karena itu, literasi politik dalam penelitian ini dipahami sebagai civic epistemic competence, bukan sekadar keterampilan teknis.

Civic epistemic competence mencakup sedikitnya lima kemampuan. Pertama, institutional knowledge, yaitu memahami kewenangan pemerintah daerah, DPRD, KPU, Bawaslu, partai, dan lembaga lain. Kedua, source evaluation, yaitu menilai siapa pembuat informasi, bukti yang digunakan, dan kepentingan yang mungkin melekat. Ketiga, contextual reasoning, yaitu memeriksa apakah kutipan, gambar, data, atau video ditempatkan dalam konteks yang benar. Keempat, verification practice, yaitu membandingkan klaim dengan dokumen resmi, media kredibel, dan layanan pemeriksaan fakta. Kelima, democratic judgment, yaitu kemampuan membedakan kritik berbasis bukti dari delegitimasi tanpa dasar.

Literasi semacam ini tidak dimaksudkan untuk membuat warga selalu mempercayai sumber resmi. Tujuannya justru memperkuat kapasitas memeriksa semua klaim, termasuk klaim pemerintah, penyelenggara pemilu, kandidat, media, dan influencer. Warga yang literat dapat mengembangkan critical distrust yang produktif, yakni skeptisisme berbasis bukti, tanpa jatuh pada destructive distrust yang

menganggap seluruh institusi pasti manipulatif. Humprecht (2023) memperlihatkan bahwa trust dan sikap terhadap demokrasi berkaitan erat dengan dinamika penyebaran disinformasi, sehingga kualitas evaluasi sumber menjadi bagian penting dari ketahanan demokrasi.

Kajian intervensi misinformation memberi dukungan tambahan. Pennycook et al. (2021) menunjukkan bahwa pengalihan perhatian sederhana terhadap akurasi dapat menurunkan kecenderungan membagikan informasi palsu. Roozenbeek et al. (2022) menemukan bahwa psychological inoculation berbasis video singkat dapat meningkatkan kemampuan mengenali teknik manipulasi. Roozenbeek, Traberg, et al. (2022) menempatkan prebunking sebagai strategi preventif yang melengkapi debunking. Temuan ini relevan bagi pendidikan pemilih lokal: materi tidak hanya berisi jadwal dan tata cara memilih, tetapi juga latihan mengenali konteks salah, akun tiruan, potongan video, statistik tanpa sumber, dan serangan emosional yang mengaburkan isu kebijakan.

Disinformasi dan Warranted Trust terhadap Demokrasi Lokal

Political trust merupakan mekanisme penting yang menghubungkan kualitas informasi dan legitimasi demokrasi. Dalam konteks ini, trust tidak berarti kepuasan sesaat terhadap pejabat atau penerimaan tanpa kritik. Kepercayaan yang demokratis lebih tepat dibaca sebagai warranted trust, yaitu kepercayaan yang memiliki dasar pada bukti, transparansi, fairness, responsivitas, dan kapasitas institusi untuk memperbaiki kesalahan. Konsep ini penting karena target demokrasi bukan menghasilkan warga yang selalu percaya, melainkan warga yang dapat membedakan kapan institusi layak dipercaya dan kapan harus dikritik.

Disinformasi dapat memengaruhi trust melalui beberapa jalur. Pertama, epistemic confusion, ketika warga menghadapi terlalu banyak versi informasi dan kesulitan menentukan kebenaran. Kedua, reputational attack, ketika institusi atau aktor politik digambarkan korup atau curang melalui klaim tidak terverifikasi. Ketiga, procedural delegitimation, ketika proses pemilu diserang melalui rumor mengenai manipulasi daftar pemilih, penghitungan suara, atau keberpihakan penyelenggara. Keempat, generalized cynicism, ketika konflik informasi berulang menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh aktor sama-sama tidak dapat dipercaya. Jalur tersebut merupakan sintesis konseptual dan tidak boleh dibaca sebagai efek kausal yang telah diukur pada warga Kota Tegal.

Transparansi data pemilih KPU Kota Tegal dapat dibaca sebagai salah satu mekanisme institusional untuk membangun warranted trust. Publikasi perubahan data dari tahap awal hingga DPT memberi audit trail yang dapat diperiksa masyarakat. Ketika angka, proses, dasar hukum, dan koreksi tersedia secara terbuka, rumor tidak otomatis hilang, tetapi institusi memiliki basis faktual yang lebih kuat untuk klarifikasi. Kepercayaan dengan demikian tidak diminta melalui slogan, melainkan dibangun melalui informasi yang dapat diverifikasi.

Respons Bawaslu Kota Tegal melalui pengawasan partisipatif dan penguatan literasi digital menunjukkan pergeseran serupa. Integritas demokrasi digital tidak hanya

bergantung pada kotak suara dan rekapitulasi, tetapi juga pada kualitas ruang publik sebelum pemungutan suara. Pada titik ini, literasi politik menjadi jembatan antara informasi dan trust: warga dengan kemampuan verifikasi yang lebih baik dapat membedakan kegagalan institusional yang nyata dari tuduhan palsu, sementara institusi yang responsif menyediakan data yang membuat proses verifikasi mungkin dilakukan.

Hubungan disinformasi dan trust bersifat kondisional. Penelitian eksperimental terbaru menunjukkan bahwa intervensi misinformation yang efektif pun dapat memiliki konsekuensi berupa peningkatan skeptisisme terhadap informasi benar apabila dirancang tanpa kehati-hatian. Karena itu, penguatan literasi harus menghindari pesan bahwa 'semua informasi patut dicurigai'. Literasi yang sehat mendorong verifikasi proporsional: mempertimbangkan sumber, bukti, konsistensi dengan dokumen, dan kemungkinan koreksi. Dengan cara ini, skeptisisme dapat tetap kritis tanpa berubah menjadi sinisme total.

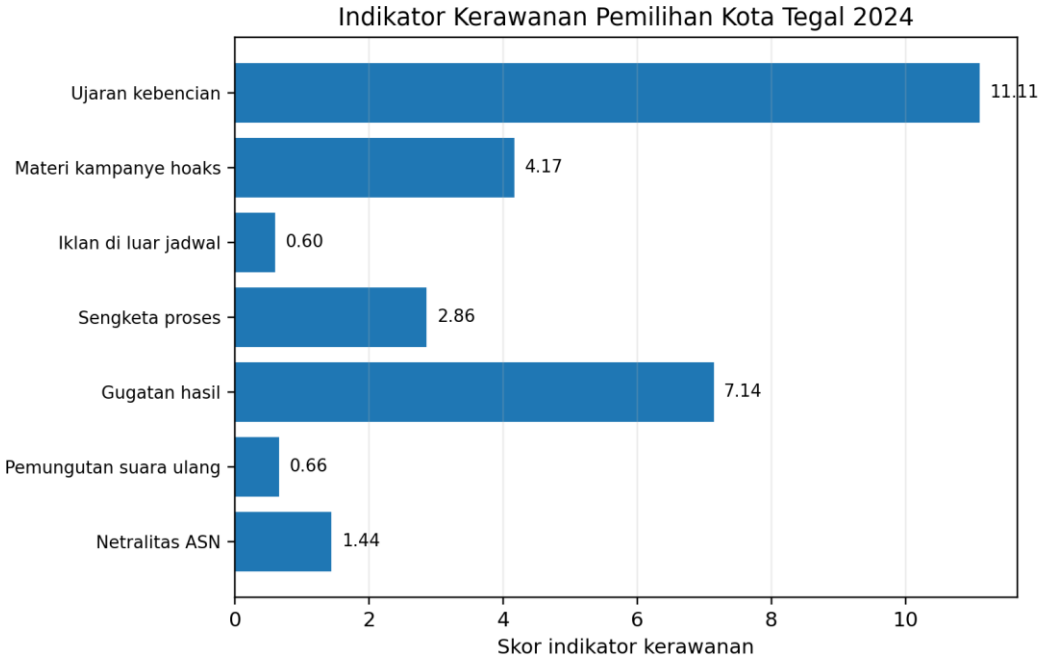

Gambar 4. Skor Indikator Kerawanan Pemilihan Kota Tegal 2024.
Sumber: Bawaslu Kota Tegal (2024). Skor adalah indikator kerawanan, bukan jumlah kasus.

Literasi Politik sebagai Mekanisme Ketahanan Demokrasi Digital

Ketahanan demokrasi digital dapat dipahami sebagai kemampuan warga dan institusi mempertahankan proses penilaian politik berbasis bukti meskipun lingkungan informasi dipenuhi manipulasi. Dalam kerangka ini, literasi politik bertindak sebagai protective capacity. Ia tidak menghilangkan disinformasi dan tidak menjamin peningkatan trust, tetapi meningkatkan kualitas proses evaluasi warga. Fungsi protektif bekerja melalui penundaan respons, pencarian sumber pembanding, pengetahuan prosedural, pengenalan teknik manipulasi, dan kebiasaan memeriksa bukti sebelum membagikan informasi.

Karena itu, literasi politik lebih tepat diposisikan sebagai kapasitas moderatif daripada mediator deterministik. Warga yang lebih literat tidak selalu lebih percaya pada pemerintah. Dalam beberapa keadaan, literasi dapat menurunkan kepercayaan apabila warga menemukan bukti kegagalan, ketidakadilan, atau inkonsistensi institusional. Penurunan semacam itu tetap demokratis karena didasarkan pada informasi yang dapat diverifikasi. Sebaliknya, kepercayaan yang meningkat akibat propaganda atau ketidakmampuan memeriksa klaim bukan bentuk trust yang normatif bagi demokrasi.

Strategi ketahanan lokal perlu menggabungkan prebunking dan debunking. Prebunking memberikan pengetahuan tentang teknik manipulasi sebelum warga terpapar konten, sedangkan debunking menyediakan koreksi terhadap klaim yang telah beredar. van der Linden (2022) menekankan pentingnya pendekatan psikologis untuk mengurangi kerentanan terhadap misinformation, sementara Roozenbeek, Traberg, et al. (2022) menunjukkan bahwa inoculation berbasis teknik dapat diterapkan pada misinformation dunia nyata. Bagi Kota Tegal, pendekatan ini dapat diterjemahkan melalui modul pendidikan pemilih berbasis contoh lokal, simulasi verifikasi akun, pembacaan dokumen KPU/Bawaslu, dan latihan membedakan hasil resmi dari tangkapan layar yang tidak memiliki sumber.

Media lokal juga memegang posisi strategis sebagai verification hub. Dalam ekosistem platform, media tidak lagi memonopoli gatekeeping, tetapi tetap memiliki kapasitas editorial untuk memeriksa dokumen, meminta konfirmasi, dan menyajikan konteks. Kolaborasi media lokal, kampus, KPU, Bawaslu, dan komunitas pemeriksa fakta dapat membentuk protokol respons cepat tanpa menghilangkan independensi masing-masing. Koreksi perlu disajikan dalam format yang mudah dibagikan dan didistribusikan melalui kanal yang sama dengan penyebaran rumor agar tidak berhenti di situs yang jarang dikunjungi warga.

Ketahanan juga membutuhkan komunikasi publik yang mengurangi information vacuum. Banyak rumor berkembang ketika lembaga terlambat menjelaskan isu yang sudah ramai. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu menyediakan data, penjelasan, dan pembaruan status sebelum ruang informasi diisi oleh spekulasi. Namun komunikasi proaktif tidak boleh berubah menjadi propaganda tandingan. Kredibilitas jangka panjang bergantung pada konsistensi, pengakuan terhadap kesalahan, transparansi metode, dan kesediaan membuka ruang pertanyaan warga.

Kerangka Multiaktor Penguatan Ketahanan Demokrasi Digital Lokal

Sintesis temuan menunjukkan bahwa hubungan disinformasi, literasi politik, dan trust tidak dapat ditangani oleh satu lembaga. Disinformasi meningkatkan biaya verifikasi dan ketidakpastian; literasi menentukan kapasitas warga memproses kondisi tersebut; sedangkan trust terbentuk dari interaksi antara informasi yang beredar dan kualitas respons institusional. Oleh karena itu, strategi lokal perlu dibangun sebagai ekosistem multiaktor yang menggabungkan kapasitas negara, penyelenggara pemilu, media, pendidikan, masyarakat sipil, dan platform digital.

Prioritas pertama adalah rapid information response. Pemerintah Kota Tegal, KPU, dan Bawaslu perlu memiliki prosedur untuk mengidentifikasi isu yang berpotensi viral, menentukan otoritas klarifikasi, menyiapkan bukti, dan mendistribusikan respons lintas-platform. Prioritas kedua adalah continuous civic learning. Pendidikan politik tidak cukup dilakukan menjelang pemilu karena warga menghadapi informasi politik setiap hari. Program sekolah, kampus, karang taruna, komunitas, dan forum warga dapat mengajarkan prosedur verifikasi, pemahaman kewenangan lembaga, pembacaan data publik, dan etika diskusi politik.

Prioritas ketiga adalah institutionalized local fact-checking. Narasi lokal tidak selalu menjadi perhatian organisasi pemeriksa fakta nasional karena skala audiens lebih kecil. Media lokal dan perguruan tinggi dapat membentuk meja verifikasi bersama yang berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan Diskominfo tanpa kehilangan independensi editorial. Model ini mengurangi information vacuum sekaligus mencegah pemerintah menjadi satu-satunya arbiter kebenaran. Evaluasi program perlu dilengkapi survei periodik mengenai pengetahuan politik, kebiasaan verifikasi, paparan disinformasi, dan trust terhadap pemerintah daerah maupun lembaga pemilu.

Implikasi bagi Tata Kelola Demokrasi Lokal

Temuan penelitian memiliki implikasi langsung bagi cara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu merancang komunikasi publik. Dalam lingkungan yang dipenuhi arus informasi cepat, strategi komunikasi tidak cukup hanya mengandalkan publikasi setelah isu berkembang. Institusi perlu membangun public information readiness, yaitu kesiapan menyediakan data yang mudah ditemukan, penjelasan yang konsisten, penanggung jawab informasi yang jelas, serta mekanisme koreksi ketika terjadi kekeliruan. Kesiapan tersebut memperkecil ruang kosong informasi yang biasanya menjadi tempat berkembangnya rumor. Prinsip ini penting bagi pemerintah kota, KPU, dan Bawaslu karena keterlambatan informasi dapat membuat klaim tidak terverifikasi lebih dahulu membentuk persepsi publik.

Komunikasi publik juga perlu membedakan antara klarifikasi, koreksi, dan pendidikan. Klarifikasi menjawab isu faktual yang sedang beredar, koreksi memperbaiki informasi salah yang telah memperoleh perhatian, sedangkan pendidikan membangun kapasitas jangka panjang agar warga tidak mudah bergantung pada satu sumber. Ketiga fungsi tersebut harus berjalan bersama. Respons yang hanya bersifat reaktif berisiko membuat institusi terus mengejar rumor, sedangkan pendidikan tanpa kemampuan merespons isu aktual dapat dianggap tidak relevan. Karena itu, rapid information response sebaiknya dihubungkan dengan basis pengetahuan yang berisi data pemilih, tahapan, regulasi, hasil, dan pertanyaan yang sering muncul sehingga klarifikasi tidak dimulai dari nol setiap kali muncul isu baru.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan prinsip proporsionalitas dalam kebijakan anti-disinformasi. Pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan penanganan informasi palsu tidak berubah menjadi mekanisme yang membatasi kritik. Tidak semua informasi keliru merupakan disinformasi, dan tidak semua kritik keras merupakan ujaran

kebencian. Pengelompokan konten perlu menggunakan kriteria transparan yang membedakan kesalahan faktual, opini, satir, kritik, manipulasi yang disengaja, serta konten yang melanggar hukum. Transparansi kriteria penting untuk mencegah intervensi anti-hoaks justru menurunkan trust karena publik melihatnya sebagai instrumen politik. Ketahanan demokrasi hanya dapat dibangun apabila perlindungan integritas informasi berjalan bersama perlindungan kebebasan berekspresi.

Bagi media lokal, hasil penelitian menguatkan kebutuhan untuk mengembangkan jurnalisme verifikasi yang tidak hanya muncul pada masa pemilu. Media dapat membangun rubrik pemeriksaan fakta, menjelaskan sumber data, dan menyajikan konteks ketika memuat klaim viral. Model semacam ini penting karena literasi politik warga tidak berkembang hanya melalui pelatihan formal, tetapi juga melalui kebiasaan konsumsi informasi sehari-hari. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dapat memperkuat kapasitas analisis data dan metodologi verifikasi, sementara hubungan dengan KPU atau Bawaslu dapat mempercepat akses terhadap dokumen primer tanpa mengurangi independensi redaksi. Dengan demikian, media lokal dapat berfungsi sebagai jembatan antara data institusional dan kebutuhan informasi warga.

Institusi pendidikan memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Sekolah, kampus, dan komunitas pemuda dapat menjadikan literasi politik sebagai proses pembelajaran berkelanjutan yang menghubungkan pengetahuan kelembagaan dengan praktik verifikasi digital. Pembelajaran tidak harus diarahkan pada pilihan politik tertentu. Fokusnya adalah kemampuan membaca data publik, mengenali otoritas sumber, memeriksa tanggal dan konteks, membandingkan beberapa sumber, serta membedakan fakta dari penilaian. Pada tingkat perguruan tinggi, kegiatan riset lokal dapat menghasilkan data yang lebih spesifik mengenai kebiasaan informasi warga Tegal, sehingga kebijakan tidak terus bergantung pada indikator nasional.

Dari sisi evaluasi kebijakan, keberhasilan program literasi tidak cukup diukur dari jumlah seminar, peserta, atau konten yang diproduksi. Indikator yang lebih substantif perlu mengukur perubahan kemampuan verifikasi, pemahaman tentang kewenangan lembaga, kemampuan mengenali manipulasi, penggunaan sumber resmi dan media kredibel, serta perubahan kualitas diskusi publik. Survei periodik dapat dilengkapi dengan eksperimen sederhana untuk menilai apakah intervensi prebunking meningkatkan kemampuan warga mengenali teknik manipulasi. Data evaluasi sebaiknya dipublikasikan agar program dapat diperiksa dan diperbaiki secara terbuka.

Secara keseluruhan, implikasi tata kelola dari penelitian ini adalah perlunya pergeseran dari pendekatan anti-hoaks yang episodik menuju governance of information integrity yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut tidak hanya bertanya bagaimana menghapus konten salah, tetapi bagaimana membuat informasi benar lebih mudah ditemukan, bagaimana meningkatkan kemampuan warga menilainya, bagaimana memastikan institusi mampu mengoreksi kesalahan, dan bagaimana mempertahankan ruang kritik yang sehat. Kerangka ini menempatkan integritas informasi sebagai bagian

dari infrastruktur demokrasi lokal, sejajar dengan transparansi prosedur, pengawasan pemilu, dan partisipasi warga.

Tabel 2. Kerangka Multiaktor Penguatan Ketahanan Demokrasi Digital Lokal di Kota Tegal

Aktor	Intervensi utama	Output	Risiko yang ditekan
Pemerintah Kota/Diskominfo	Data terbuka, klarifikasi cepat, dashboard isu	Informasi resmi mudah diverifikasi	Information vacuum dan rumor
KPU Kota Tegal	Pendidikan pemilih dan transparansi data pemilih/hasil	Warranted procedural trust	Delegitimasi prosedur
Bawaslu Kota Tegal	Pengawasan partisipatif, kanal lapor, prebunking	Deteksi dan respons dini	Hoaks kampanye dan ujaran kebencian
Media lokal	Meja cek fakta dan jurnalisme data	Verifikasi independen	Klaim viral tanpa konteks
Perguruan tinggi/sekolah	Literasi politik dan riset lokal	Civic epistemic competence	Kerentanan verifikasi
Masyarakat sipil/platform	Amplifikasi koreksi dan transparansi moderasi	Ekosistem informasi lebih sehat	Manipulasi dan amplifikasi palsu

Sumber: Sintesis peneliti, 2026.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa disinformasi digital, literasi politik, dan kepercayaan publik merupakan tiga dimensi yang saling terkait dalam demokrasi lokal Kota Tegal. Disinformasi tidak hanya menambah jumlah informasi salah, tetapi meningkatkan biaya verifikasi, ketidakpastian epistemik, dan peluang delegitimasi prosedur. Literasi politik berfungsi sebagai civic epistemic competence dan protective capacity yang memungkinkan warga mengevaluasi sumber, memahami konteks, memverifikasi klaim, serta membedakan kritik berbasis bukti dari delegitimasi yang dibangun melalui informasi palsu. Sementara itu, kepercayaan lebih tepat dipahami sebagai warranted trust yang dibentuk oleh interaksi antara kualitas informasi, transparansi, responsivitas, dan kredibilitas institusi. Triangulasi data tidak membuktikan hubungan kausal pada tingkat individu, tetapi menunjukkan bahwa kualitas lingkungan informasi telah menjadi bagian penting dari integritas demokrasi lokal. Penguatan ketahanan demokrasi digital karena itu membutuhkan pendekatan multiaktor yang menggabungkan komunikasi publik transparan, pengawasan pemilu, rapid information response, pendidikan politik berkelanjutan, fact-checking lokal, penguatan media, dan keterbukaan data. Agenda penelitian berikutnya perlu menguji kerangka ini melalui survei lokal, eksperimen, dan desain longitudinal agar hubungan antara paparan disinformasi, literasi politik, dan political trust dapat diestimasi secara lebih langsung.

Referensi

Ahmad, N. (2022). Disinformation order and social media algorithmic trap: New challenges for sustainability of Indonesia's united nation-state narrative and liberal democratic norms. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, *7*(2). https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i2.37261

Evanalia, S. (2022). Peran jurnalisme media sosial dalam mewujudkan demokrasi Indonesia di era post truth. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, *5*(1). https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.86

Humprecht, E. (2023). The role of trust and attitudes toward democracy in the dissemination of disinformation: A comparative analysis of six democracies. *Digital Journalism*. https://doi.org/10.1080/21670811.2023.2200196

Iannone, A. (2022). Democracy crisis in South-East Asia: Media control, censorship, and disinformation during elections in Indonesia, Thailand and the Philippines. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *26*(1). https://doi.org/10.22146/jsp.71417

Mont'Alverne, C., Arguedas, A. R., Banerjee, S., Toff, B., Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2024). The electoral misinformation nexus: How news consumption, platform use, and trust in news influence belief in electoral misinformation. *Public Opinion Quarterly*, *88*(SI), 681–707. https://doi.org/10.1093/poq/nfae019

Pennycook, G., Epstein, Z., Mosleh, M., Arechar, A. A., Eckles, D., & Rand, D. G. (2021). Shifting attention to accuracy can reduce misinformation online. *Nature*, *592*, 590–595. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03344-2

Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The psychology of fake news. *Trends in Cognitive Sciences*, *25*(5), 388–402. https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007

Roozenbeek, J., Traberg, C. S., & van der Linden, S. (2022). Technique-based inoculation against real-world misinformation. *Royal Society Open Science*, *9*(5), 211719. https://doi.org/10.1098/rsos.211719

Roozenbeek, J., van der Linden, S., Goldberg, B., Rathje, S., & Lewandowsky, S. (2022). Psychological inoculation improves resilience against misinformation on social media. *Science Advances*, *8*(34), eabo6254. https://doi.org/10.1126/sciadv.abo6254

Shahbazi, M., & Bunker, D. (2024). Social media trust: Fighting misinformation in the time of crisis. *International Journal of Information Management*, *77*, 102780. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2024.102780

van der Linden, S. (2022). Misinformation: Susceptibility, spread, and interventions to immunize the public. *Nature Medicine*, *28*(3), 460–467. https://doi.org/10.1038/s41591-022-01713-6

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Council of Europe.